

DIMENSI KEKUASAAN DALAM EKONOMI

Christy Damayanti

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

Political economy approach to place the state as a formal institution that rests on the concept of values, shared interests, and power, actively participates in economic activities. The state is managing the resources of power, and power relations within the state will determine the relations and economic distribution. Dimension of state-owned power used to perform three functions in the economy, namely economic activity regulation, income redistribution, and procurement of commodity goods and public services both tangible or intangible.

State and non-state economic actors affect each other, with the state power system determine patterns of economic activity, while the economy determine the redistribution of power and wealth.

Keywords: *power, economic activity, political economy*

PENDAHULUAN

Memandang kebijakan dan aktivitas ekonomi melalui pendekatan kekuasaan berarti menggunakan pendekatan ekonomi politik. Dalam kaca mata ekonomi klasik, sebuah kegiatan pertukaran barang dan jasa untuk semata-mata ditujukan untuk kemakmuran materiil dan penekanan pada efisiensi produksi yang didasarkan pada ketersediaan tenaga kerja dan sumberdaya alam. Tenaga kerja bernilai sama dengan kapital dan material dasar produksi, sehingga disebut sumberdaya manusia. Menurut pendekatan ini pasar adalah lembaga sosial utama, dan para pemilik modal yang terlibat di pasarlah yang dapat menentukan apa yang akan diproduksi. Aktivitas pasar ini didominasi peran individualisme yang bebas dari intervensi negara, karena intervensi negara dianggap tidak akan membawa keuntungan maksimal.

Negara dalam pendekatan ini hanya dianggap berperan dalam melindungi hak atas kekayaan dan menciptakan lingkungan yang menjaga kelancaran bekerjanya pasar. Sedangkan keluarga/rumah tangga berperan memaksimalkan kepuasan melalui konsumsi barang-barang yang diproduksi secara massa untuk memaksimalkan keuntungan. Selain itu keluarga juga menghasilkan *input* abstrak yang disebut “tenaga kerja”.

Dalam pendekatan ekonomi politik aktivitas ekonomi dipandang tidak sekedar memperhatikan bagaimana kemakmuran ditingkatkan, namun juga bagaimana hasil produksi, distribusi dan konsumsi, diorganisasikan. Jika ekonomi klasik menghindari persoalan normatif, termasuk netral dalam etika dan moral, maka dalam pendekatan ekonomi politik, aktivitas ekonomi tidak sekedar

mambawa kemakmuran namun juga mempertimbangkan etika dan moral. Perilaku manusia tidak sekedar berpedoman pada rasionalitas, tetapi juga diwarnai dengan filantropi, moralitas, dan pertimbangan etika dan rasa tanggung jawab sosial. Berkaitan dengan peran negara, pendekatan ini mengutamakan peran lembaga sosial dan politik, termasuk lembaga kekuasaan, sebagai alat produksi kemakmuran. (Derrick K Gondwe, dalam Muhtar Mas'ood, 2003: 26). Maka ketika zaman berkembang, kegiatan ekonomi muncul sebagai hasil interaksi yang kompleks dari berbagai aspek, maka berkembanglah pendekatan ekonomi politik tersebut, untuk menjelaskan di mana pasar dan negara harus bekerjasama, di mana keuntungan individual dan kepentingan publik harus saling mengimbangi, dan di mana relasi yang bersifat sukarela pada saat tertentu harus diubah dalam transaksi yang berdasarkan relasi kekuasaan.

NEGARA = RELASI KEKUASAAN

Kekuasaan adalah penggunaan sejumlah sumberdaya (*asset*, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain. Kekuasaan pada dasarnya adalah relasi. Sumberdaya yang ada diorganisasikan (dari kata "*organum*" yang berarti instrumen/alat) untuk memperoleh atau mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berikut ini adalah tabel untuk memetakan sumberdaya kekuasaan dan efek kepatuhan yang ditimbulkan.

No	Tipe Sumberdaya	Contoh Sumberdaya	Motivasi yang Ditimbulkan
A	Fisik	Persenjataan	Kepatuhan karena menghindari bahaya fisik
B	Ekonomi	Kekayaan, kontrol atas barang dan jasa	Kepatuhan karena mengharapkan kekayaan
C	Normatif	Moralitas, legitimasi, wewenang, dll	Kepatuhan karena mengakui hak moral yang dimiliki penguasa
D	Personal	Kharisma, pertemanan, popularitas, dll	Kepatuhan karena mengidentifikasi diri, tertarik, pada figur penguasa
E	Keahlian	Informasi, pengetahuan, inteligensi, dll	Kepatuhan karena penguasa memiliki pengetahuan dan informasi lebih.

(Charles Andrain, 1992: 132)

Dari tabel di atas terlihat bahwa penguasaan dalam sumberdaya ekonomi memiliki reward diperolehnya kekuasaan. Ketika ekonomi memandang keuntungan dalam skala individual dan segala sesuatu transaksi bersifat sukarela tanpa paksaan, maka politik melihat kekuasaan dalam memaksakan transaksi, sesuai aturan yang ada. Lembaga kekuasaan formal terbesar dalam entitas bangsa adalah negara. Dengan demikian, negara mempunyai sumberdaya utama yang tidak dimiliki otoritas lainnya, yaitu kekuatan kegalitasan dan legitimasi: yaitu hak untuk memaksa (*power to coerce*). Negara memiliki hak untuk menetapkan dan memberlakukan berbagai regulasi ekonomi yang mengatur semua aktivitas ekonomi seperti

melakukan monopoli, mengatur moneter, bahkan menentukan bentuk dan aliran pasar (Didik J Rachbini, 2004: 13 – 16). Posisi seperti ini menimbulkan situasi aktivitas ekonomi dapat dilakukan individu maupun institusi negara, namun pola pemerataan akan mengikuti pola relasi kekuasaan. Misalnya pada negara di mana pola relasi kekuasaan bersifat tertutup, maka kesenjangan hasil-hasil aktivitas ekonomi akan tinggi, dengan konsentrasi aset dan akses kekayaan dominan berada di tangan elite. Ini dapat kita lihat seperti yang terjadi pada masa Orde Baru di mana aset kekayaan nasional dominan berada di tangan sekelompok kecil elite ekonomi yang memiliki akses yang besar kepada elite politik.

EFEKTIVITAS DIMENSI KEKUASAAN DALAM AKTIVITAS EKONOMI

Dalam analisis politik, tiga konsep dasar politik adalah: nilai, kepentingan, dan kekuasaan. Semua aktivitas politik mengandung ketiga konsep tersebut. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan menjadi tujuan dari setiap aktivitas. Aktivitas politik yang bermakna selalu berdasarkan nilai tertentu. Kepentingan adalah unsur yang memberikan dinamika dalam kekuasaan, terutama kepentingan untuk memperoleh, mempertahankan, dan meningkatkan kekuasaan. Politik sendiri, pada dasarnya adalah kegiatan penciptaan, distribusi, dan implementasi kekuasaan.

Dalam praktik kekuasaan, kekuasaan muncul dalam bentuk relasional atau kekuasaan langsung, dan dalam bentuk kekuasaan tidak langsung atau kekuasaan struktural. Kemampuan relasional adalah kemampuan mengorganisasikan sumberdaya untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain. Kekuasaan struktural adalah kemampuan membentuk dan menentukan struktur (misalnya struktur ekonomi pertanian), termasuk di sini kekuasaan struktural dilakukan melalui berbagai regulasi yang mempengaruhi jalannya aktivitas ekonomi. Dalam praktek, kekuasaan struktural ini jauh lebih sering dilakukan penguasa, misalnya dengan menentukan agenda wacana dalam masyarakat, merancang regulasi pasar dan bagaimana aktor-aktor ekonomi harus bertindak, dan lain-lain (Muhtar Mas'ood, 2003: 30 - 36).

Regulasi dalam segala bidang, yang ditetapkan pemerintah (negara) sebagai kebijakan, menurut Donald Rotchild adalah menghubungkan kepentingan publik dengan kepentingan individu. Di sinilah interaksi ekonomi dapat dilakukan negara dengan kekuasaan yang legal formal, dengan paksaan, atas nama kepentingan publik. Kemampuan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada aturan main (regulasi ekonomi) yang ditentukan institusi politik. Bagaimana cara mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ekonomi yang ada, sekaligus bagaimana institusi politik mengelola sumberdaya kekuasaan, dan hasilnya menguntungkan individu secara memuaskan, sekaligus memenuhi kepentingan bersama (publik)? Inilah persoalan yang senantiasa muncul ketika pendekatan ekonomi politik akan diimplementasikan dalam sebuah formulasi kebijakan.

Untuk memahami interaksi institusi politik dan institusi ekonomi, dapat dilihat dari analisis fungsi pemerintah dalam perekonomian. Di dalam masyarakat dengan institusi sosial modern, pemerintah menjalankan tiga tugas yang berkaitan

erat dengan aktivitas ekonomi, yaitu pengaturan aktivitas ekonomi, redistribusi pendapatan, dan pengadaan beberapa jenis barang dan jasa tertentu.

Kegiatan pengaturan aktivitas ekonomi meliputi penyusunan rangsangan produksi melalui berbagai insentif yang diberikan pada jenis-jenis produksi komoditas strategis, usaha penekanan jumlah pengangguran, dan lainnya. Untuk mencapai sasaran dalam fungsi ini, pemerintah menggunakan berbagai cara pengendalian langsung maupun tidak langsung. Pengendalian langsung dapat dilakukan dalam kegiatan ekonomi antara lain dengan membuat undang-undang keselamatan industri, penetapan upah minimum, peraturan mengenai diwajibkannya industri melakukan analisis dampak lingkungan, penetapan standar harga bagi beberapa komoditas barang dan jasa, dan sebagainya. Di dalam sistem ekonomi apapun, pengendalian institusi politik terhadap aktivitas ekonomi iniseltalu ada, dalam kadar yang berbeda-beda tergantung pada sistem politik yang ada. Pada beberapa negara yang mengarah pada model sosialis, pengendalian cenderung lebih luas dilakukan. Sedangkan di beberapa negara Eropa barat dan Amerika, pengendalian upah dan harga dilakukan lebih untuk mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi (Charles Andrain, Op.cit, hal. 230 – 232).

Pengendalian tidak langsung adalah regulasi yang dibuat negara tanpa langsung menyentuh institusi produksi. Kebijakan fiskal, kebijakan anggaran, dan lebih bersifat memelihara kondisi yang mampu mendorong aktivitas ekonomi sekaligus aman bagi kondisi sosial politik.

Di samping mengatur untuk aktivitas ekonomi untuk menjamin stabilitas harga, pengendalian pengangguran, negara juga wajib mengambil kendali dalam redistribusi pendapatan. Kebijakan yang diambil pemerintah antara lain dengan penetapan pajak, penyediaan berbagai fasilitas jaminan sosial seperti penyediaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, penyediaan layanan perumahan, pemberian subsidi-subsidi langsung, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia: dana BOS untuk siswa, dana Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin, ataupun berbagai kebijakan pajak. Berbagai kebijakan pajak dilakukan pemerintah berbagai negara. Pajak regresif berarti orang yang lebih miskin membayar persentase yang lebih besar daripada orang yang lebih kaya, pajak proporsional, semua orang akan membayar dalam persentase yang sama tanpa mepedulikan kekayaan mereka, sedang dengan model pajal progresif, ditetapkan prosentase yang lebih tinggi bagi mereka yang lebih tinggi pendapatannya. Pajak jaminan sosial di beberapa negara Eropa Barat yang dikuasai Partai Sosialis Demokrat dan Buruh, ditentukan dalam standar yang tinggi karena dianggap dapat meredistribusikan pendapatan dari golongan pekerja yang lebih muda kepada populasi yang tua, yang telah pensiun. Ini terutama dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk lanjut usia dengan angka harapan hidup yang tinggi.

Keterlibatan negara dalam pengadaan beberapa jenis barang dan jasa adalah bentuk keterlibatan yang ke tiga dari negara terhadap aktivitas ekonomi. Beberapa barang dan jasa pengadaannya dianggap perlu didesentralisasikan, dimonopoli, dan dikontrol oleh negara. Negara bertanggung jawab atas penyediaan komunitas publik, yang diciptakan dalam bentuk barang-barang yang indrawi (*tangible*) dan

yang tidak kelihatan (*intangible*). Termasuk dalam komoditas publik yang *intangible* di atas, adalah kebijakan publik. Kebijakan publik ini akan menjadi komoditas *intangible* bernilai bagi yang membutuhkan dan memanfaatkannya.

PENUTUP

Semua tugas dan wewenang negara dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi di atas menunjukkan bahwa negara dengan kekuasaannya yang bersifat koersif mampu mempengaruhi aktivitas ekonomi. Kekuasaan yang diformalkan dalam institusi negara akan menentukan sistem ekonomi dan bagaimana aktor ekonomi beraktivitas, namun di sisi lain proses ekonomi cenderung mendistribusi kekuasaan dan kekayaan. Bagaikan dua saudara yang tak terpisahkan, aktivitas politik dan aktivitas ekonomi akan saling mempengaruhi, berkelindan, untuk saling mengoptimalkan keuntungan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2008, *Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*, Suara Bebas, Jakarta.
- Andrain, Charles F, 1992, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Tiara Wacana, Jogjakarta.
- Mas' oed, Muhtar, 2003, *Ekonomi Politik*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Rachbini, Didik J, 2004, *Ekonomi Politik*, Granit, Jakarta.
- , 2006, *Teori Pilihan Publik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.